

Manajemen Keuangan Berbasis Penerapan Nilai-Nilai Profetik

¹ Saiful Muchlis, ² Rimi Gusliana Mais, ^{3*} Arif Hartono

¹ State Islamic University Alauddin, Makassar; ² Institute of Economic Science, Jakarta; ³ Muhammadiyah University of Ponorogo
*arifhrtn@umpo.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submit:
3 Februari 2022
Accepted:
2 Maret 2022
Publish:
11 Maret 2022

Article Type:
Field Research

KEYWORD:

Financial Management
Prophetic Values
Implementation of Prophetic
Values

ABSTRACT

This study discusses to study the process of financial management and implementation of prophetic values in financial management at the Office of the Ministry of Religion in Takalar Regency. Prophetic values in this study include shiddiq, amanah, fathanah, and tabligh. This type of research is field research using qualitative research types with interpretive paradigms and using phenomenological and theological research. The results of this study prove that the financial management in the Office of the Ministry of Religion of Takalar Regency has been carried out according to the procedures performed. Knowledge and implementation of prophetic values by financial managers in the Office of the Ministry of Religion in Takalar Regency is realized through the Five Culture of Work of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, namely Integrity, professionalism, innovation, responsibility, and exemplary. Researchers see the prophetic value in the financial management of Takalar Regency cultivated through the awareness of the managers to always increase their faith by performing the dhuha prayer, and reading the Qur'an before starting activities in the work environment.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas untuk mengkaji proses pengelolaan keuangan dan penerapan nilai-nilai profetik dalam pengelolaan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Nilai-nilai profetik dalam penelitian ini meliputi shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan menggunakan penelitian fenomenologis dan teologis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar telah dilakukan sesuai prosedur yang dilakukan. Pengetahuan dan implementasi nilai-nilai profetik oleh pengelola keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar diwujudkan melalui Lima Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Teladan. Peneliti melihat nilai profetik dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Takalar yang ditanamkan melalui kesadaran para pengelola untuk selalu meningkatkan keimanan dengan menunaikan shalat dhuha, dan membaca Al-Qur'an sebelum memulai aktivitas di lingkungan kerja.

Copyright © 2022. **Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)**,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 

1. PENDAHULUAN

Citra Kementerian Agama menjadi sorotan publik melalui rentetan catatan buruknya. Beberapa kasus yang melibatkan Kementerian Agama pernah diusut oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) diantaranya, kasus dugaan penyalahgunaan dana ibadah haji, korupsi pengadaan Al-Qur'an, korupsi proyek pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah, korupsi dana operasional menteri, rapat fiktif, jual beli jabatan, dan berbagai kasus lainnya yang mendukung citra buruk pada Kementerian Agama (Damarjati, 2018). Kalimat "Ikhlâs Beramal" sebagai semboyan Kementerian Agama bermakna bahwa karyawan dalam

mengabdikan kepada masyarakat dan negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas, namun realitasnya, kementerian ini menjadi sorotan publik karena berbagai kasus kecurangan akuntansi yang melibatkan *stakeholders* di Kementerian Agama.

Sektor publik sering menjadi *maqam* monopoli berbagai kepentingan. Organisasi sektor publik dituntut agar memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya karena dinilai sebagai sarang inefisiensi, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi (Sayuti *et al.*, 2018). Tata kelola dalam administrasi publik telah menjadi isu global sebagai akibat dari aliran kegagalan tata kelola, penipuan, inefisiensi, korupsi, dan kontrol internal dan manajemen keuangan yang buruk secara terus-menerus (Azis *et al.*, 2015). Kasus-kasus kecurangan (*fraud*) di Indonesia banyak dilakukan oleh para politisi dalam proses penganggaran, penyelenggaraan tender proyek dan pelaksanaan peroyek pembangunan. Peningkatan kepercayaan agama atau religiusitas individu telah meningkatkan rasa takut dan memberikan pencegah yang baik untuk perilaku korup melalui instruksi dan arahan dari kelompok ulama berdasarkan teks-teks suci (Zuhaera dan Yezhuang, 2017). Heterogenitas diantara agama-agama hierarkis seperti Katolik, Kristen Ortodoks dan Islam menunjukkan sikap berbeda terhadap kepatuhan pada otoritas, konten budaya negatif, kepercayaan, dan kekeluargaan (Ko dan Moon, 2014).

Revolusi jiwa adalah salah satu usaha untuk mencegah terulangnya berbagai tindak kecurangan di Kementerian Agama. Pola pikir dikotomis yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik adalah pola pikir yang tidak tepat, karena kedua aspek tersebut ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait (Ubaidillah, 2008). Saat spiritualitas menjadi pegangan dalam pengembangan akuntansi, maka disiplin akuntansi akan menjadi transendental dan turut berkontribusi positif dalam menciptakan dan memelihara perdamaian, inklusifitas, kepedulian, keadilan, kesejahteraan dan keselarasan (Efferin, 2015). Islam menjadi bagian dari budaya, oleh karena itu, perubahan radikal dalam pemikiran akuntansi itu menjadi penting ketika nilai historis budaya hadir sebagai penyeimbang (Rahayu, 2014; Fitria, 2017; Ahyaruddin *et al.*, 2017).

Nilai *prophetic* memiliki unsur ibadah, kehidupan yang menghidupi, amar ma'ruf nahi mungkar, serta *sacral genesis* keilahian. Nilai *prophetic* menuntut dialektika manusia, alam, dan Tuhan secara intensif dan harmonis kemudian menghasilkan produk pemikiran dan perilaku baru yang lebih sehat, komprehensif, dan berguna bagi kemanusiaan sehingga manusia yang terilhami oleh nilai *prophetic* akan berperilaku positif yang berkualitas, santun, terus berbuat untuk kebaikan bersama, memegang hukum dan aturan, disiplin, dan suka damai (Roqib, 2013). Entitas dalam hal ini merupakan wadah manifestasi realitas Ilahi yang diwujudkan melalui interaksi insan di dalamnya (Kusdewanti dan Hatimah, 2016).

Penyusunan laporan keuangan yang relevan dan representatif pada organisasi sektor publik perlu dilakukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat maupun *stakeholders* sehingga sistem pengendalian internal digunakan sebagai prosedur operasional organisasi untuk mengarahkan dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan organisasi. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik menunjang keberhasilan organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan dapat mencerminkan praktik manajerial yang baik pula (Wijayanti dan Setiawan, 2016).

Pengendalian internal sangat besar pengaruhnya atas laporan keuangan karena akan menimbulkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi (Lumempouw *et al.*, 2015). Pengendalian internal akan menjadi *early warning* yang efektif bagi

institusi atas indikasi terjadinya *mismanagement* atau penyimpangan karena posisinya langsung bersinggungan dengan keseluruhan tubuh institusi (Zamzami dan Faiz, 2015). Sistem pengendalian internal menyediakan suatu penekanan pada akuntabilitas sehingga praktiknya di sektor publik penting pada setiap tahap dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi sektor publik (Azis *et al.*, 2015). Keefektifan suatu sistem pengendalian ditentukan oleh seberapa jauh sistem tersebut sesuai dengan karakteristik organisasi (Sawitri, 2011).

Penetapan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keandalan catatan akuntansi, karena sistem pengendalian internal dapat membantu mengurangi kemungkinan kesalahan acak. Ada dua jenis kesalahan yang dikenal dalam akuntansi yaitu, kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Perbedaan antara kedua jenis kesalahan ini hanya dibedakan oleh jurang yang sangat tipis, yaitu ada atau tidak adanya unsur kesengajaan. Standar pun mengenali bahwa seringkali mendeteksi kecurangan lebih sulit dibandingkan dengan kekeliruan karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu (Yurmaini, 2017).

Fokus perhatian manajer pada unsur non finansial yang juga sangat menunjang kinerja perusahaan baik langsung maupun tidak langsung (Febrianty dan Divianto, 2017). Kontrol Internal membantu melindungi dana, memberikan pengelolaan aset yang efisien dan efektif, dan memastikan akuntansi keuangan yang akurat (Ahiabor dan Mensah, 2013). Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar kepada *stakeholders* dan untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal (Bongani, 2013). Jika struktur pengendalian internal berjalan dengan baik dan efektif maka semua kegiatan, sumberdaya organisasi, dan data dapat dimonitor dan dikendalikan (Murtin, 2015).

Pengelolaan keuangan harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansinya yang merupakan dua prinsip penting yang tak dapat dipisahkan, yang berorientasi pada ibadah semata-mata mencari ridha Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut telah terjewantahkan pada apa yang disebut dengan nilai-nilai profetik yaitu nilai-nilai kejujuran (*shiddiq*), kepercayaan (*amanah*), intelektual (*fathanah*), dan komunikatif (*tabligh*). Konsep akuntabilitas yang telah sarat dimasuki nilai-nilai rasionalitas sangat memerlukan *tazkiyatun nafs* (pensucian jiwa) berdasarkan Islam (Prasetio, 2017). Kejujuran tidak datang dari luar, tetapi bisikan kalbu yang secara terus-menerus mengetuk-ngetuk dan membisikkan nilai moral luhur yang didorong gelora cinta yang meng-Ilahi. Seseorang yang jujur (*shiddiq*) pasti akan selalu berbuat benar, dan tidak mungkin terjerumus berbuat buruk, bila ia terjerumus tentulah kejujurannya telah hilang (Muhasim, 2017).

Sistem pengendalian internal yang tepat dan sistematis sangat baik diterapkan karena membantu menumbuhkan kepercayaan di antara *stakeholders* (Azis *et al.*, 2015). Akuntabilitas penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal (Endahwati, 2014). Pihak-pihak terkait, khususnya pelaksana pengelola keuangan ini juga harus memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (Ubaedillah dan Rozak, 2014: 198). Kementerian Agama yang seharusnya menjadi kementerian paling bersih dan jadi contoh dari kementerian lainnya ternyata kini tercoreng dengan kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabatnya. Penyebab berbagai *fraud* yang multidimensi diperparah dengan inefektivitas pemberantasan *fraud* yang disebabkan oleh rendahnya integritas individu dan lemahnya pengendalian internal

serta belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antar institusi pengelola resiko korupsi di Indonesia

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Stewardship Theory

Stewardship theory adalah teori yang dikemukakan oleh Lex Donaldson dan James H. Davis pada tahun 1989. Teori ini menggambarkan situasi dimana para pengelola tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang untuk membentuk suatu perilaku yang mengarah pada sikap melayani (*stewardship*). Akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principle*. Fungsi *stewardship theory* pada organisasi sektor publik adalah menjaga kepercayaan yang diberikan *principle* seperti menerapkan akuntabilitas kinerjanya (Zoelisty dan Adityawarman, 2014). *Stewardship theory* ini dapat menjadi landasan agar pemerintah bekerja atas nama rakyat dan selalu berfokus pada pencapaian hasil yang optimal dan berguna bagi masyarakat luas sehingga dapat menjadi dasar pemikiran agar tata kelola pemerintahan kita jauh dari tindakan-tindakan amoral. Pemerintah sebagai *steward* mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai *prophetic* untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat sebagai *principal*.

b. Nilai Prophetic

Prophetic berasal dari bahasa Inggris asal kata dari *prophet* yang berarti nabi atau rasul, sedangkan *prophetic* berarti kenabian yang menunjukkan kepada sifat kenabian. Muhammad saw. adalah teladan terbaik umat manusia. Beliau menempati posisi pertama sebagai orang paling berpengaruh di Dunia. Kecerdasan dan akhlaknya harus dijadikan teladan terbaik. Sifat-sifat Rasulullah yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*. *Shiddiq* (benar, jujur, valid) akan memunculkan sifat efektifitas dan efisiensi. Efektifitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat dan benar sedangkan efisiensi adalah melakukan aktifitas dengan benar dan hemat. *Amanah* (*responsibility*, dapat dipercaya, kredibilitas) dapat membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Sifat *amanah* memiliki posisi yang fundamental dalam setiap aktivitas. Implikasi *Fathanah* (kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalisme, intelektualitas) dalam setiap aktifitas kerja adalah bahwa segala aktifitas harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan dan optimalisasi semua akal yang ada untuk mencapai tujuan. *Tabligh* (komunikatif, transparansi) menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal, interpersonal), seperti pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini masyarakat, dilakukan dengan benar dan proposional.

1) Shiddiq

Shiddiq atau benar adalah sesuai dengan suatu perkataan, sikap, ataupun perbuatan dengan kenyataannya. *Shiddiq* juga biasa disebut *jujur*. *Shiddiq* yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya (Tusriyanto, 2014). Tidak berdusta dan berkata jujur merupakan arti dari *Shiddiq* yang

harus dilakukan dalam melakukan berbagai macam aktivitas seperti transaksi bisnis (Zahroh dan Nafik, 2015). Benar, lurus, jujur, berpedoman pada nurani, sabar, dan konsisten. Budaya kejujuran merupakan sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik itu berupa harta maupun tanggung jawab (Muhsin, 2017). Jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena atau realitas (Almunadi, 2016). *Shiddiq* berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam tanpa adanya pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran sulit ditemukan di tengah-tengah peradaban manusia yang semakin maju, bahkan tidak lagi menarik bagi kebanyakan orang saat ini (Almunadi, 2016). Kejujuran adalah pondasi dan kunci menuju suatu kesuksesan. Sifat *shiddiq* yang ada pada diri Rasulullah saw., dengan kehendak Allah telah mengantarkannya meraih kesuksesan dalam berdagang (Adji dan Ryandono, 2017). Fenomena tentang ketidakjujuran saat ini menjadi hal yang sangat faktual. Dampak dari ketidakjujuran diantaranya adalah seperti korupsi, kecurangan akademik dan menyebarnya berita hoax dimedia sosial yang meresahkan masyarakat (Suud dan Subandi, 2017). Berbagai tindak penyimpangan sangat dipengaruhi oleh hal lain yaitu kompetensi moral yang dapat mempengaruhi kualitas dan perilaku etis individu (Santoso dan Yanti, 2015).

2) Amanah

Amanah adalah nilai dasarnya terpercaya, dan nilai-nilai dalam pemerintahan yaitu adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur pastilah orang tersebut amanah (terpercaya) (Nafiuddin, 2018). Amanah adalah perintah atau kewajiban yang Allah bebankan kepada hambanya serta janji yang Allah ambil dari mereka. Amanah juga memiliki arti *Wara'* (hati-hati) dan *Zuhud* (tak terpedaya kehidupan dunia) (Azmi dan Hary, 2013). Amanah merupakan sifat mulia yang telah melekat pada diri Rasulullah saw. yang tidak dapat terpisahkan dengan *hablumminallah* dan *hablumminannas* (Dalimunthe, 2016). Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang baik) dalam segala hal (Noviandani dan Septiarini, 2015). Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap mukmin, apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat. Dalam pelayanan publik, mutu pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan (Elrado *et al.*, 2014). Dengan memegang prinsip amanah, apapun tanggung jawab yang diterima akan selalu dapat dilaksanakan dengan baik. Akuntabilitas adalah wujud dari pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi atas segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang harus dipegang untuk *good governance*. Amanah (*accountability*) lebih mengacu pada memberi dan menuntut pertimbangan atau kebijakan untuk melakukan sesuatu (Chowdhury *et al.*, 2005). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban tindakan seseorang atas mandat yang dipercayakan kepadanya (Asdar *et al.*, 2014). Akuntabilitas menjadi kunci sukses suatu entitas untuk tetap eksis dan bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat (Ahyaruddin *et al.*, 2017). Membangun sistem akuntabilitas keuangan yang kuat

adalah langkah penting dalam membuat lembaga publik yang efektif yang mampu memberikan layanan publik dasar kepada warga (Eton *et al.*, 2018).

3) Fathanah

Fathanah berarti memiliki pengetahuan luas, cerdas, mengerti akan sesuatu dan dapat menjelaskannya. Kecerdasan yang dimaksudkannya ini bukan hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual. Sifat ini mendorong kearifan berfikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme (Nafiuddin, 2018). *Fathanah* artinya mengerti, memahami dan menghayati secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban yang akan menumbuhkan kreativitas dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan dan informasi baik yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun perusahaan umum (Zahroh dan Nafik, 2015). Cerdas yang dibangun karena ketaqwaan kepada Tuhan, mampu menjadi *problem solver*, dan mempunyai keterampilan yang teruji (Azmi dan Hary, 2013). Nabi Muhammad merupakan seorang manajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang (Sakdiah, 2016). Ilmu dan pengetahuan yang sangat luas merupakan kecerdasan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw., yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan, memecahkan, atau memberikan solusi dari berbagai persoalan umat. Melakukan perubahan, perbaikan, pengembangan, memahami rahasia ketuhanan, dan terhindar dari kebodohan rohani merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kecerdasan atau sifat *fathanah* (Azmi dan Hary, 2013).

4) Tabligh

Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. *Tabligh* nilai dasarnya adalah komunikatif dan nilai bisnisnya adalah supel. Proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik menunjukkan suatu kemampuan berkomunikasi (Nafiuddin, 2018). Pada dasarnya, *tabligh* merupakan kegiatan penyampaian secara lisan, baik formal maupun informal. Istilah ini diterjemahkan dalam bahasa manajemen sebagai supel (mudah berkomunikasi), diskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat tanggap, koordinasi, kendali dan supervise (Zahroh dan Nafik, 2015). Secara umum, *tabligh* berarti mengajak orang lain melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan (*amar makruf nahi munkar*), berkomunikasi asertif, dan efektif. Mengatakan dengan jelas segala kebenaran, kesalahan, ketidakmampuan, dan ketidaktahuan yang nyata (Azmi dan Hary, 2013). *Tabligh* tidak membebankan manusia karena dilakukan sesuai kemampuan. Setiap manusia yang menyandang suatu jabatan maka ia berkewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada manusia yang lain (Furqan, 2015). Konsep *Tabligh* menurut Sayyid Quthub dalam Ali (2014), *tabligh* berarti menyampaikan dan menyeru manusia kepada kebenaran agama, terutama kebenaran aqidah tauhid, karena itu bagi para Nabi dan Rasul Allah tentang kewajiban *tabligh* menurut Sayyid Quthub, dikaitkan dengan dua kepentingan, kepentingan *tabligh* dilakukan untuk member informasi kepada manusia tentang adanya kebenaran dari Allah Swt, lalu mereka diharapkan menerima dan beriman kepada kebenaran yang dibawa para Nabi dan Rasul Allah agar mereka terbebas dari azab Allah. Kedua, *tabligh* dilakukan sebagai

argument (*Hajjah*) Allah atas manusia, maksudnya dengan tabligh berarti kebenaran telah disampaikan oleh Allah Swt kepada manusia melalui Nabi dan Rasul-Nya, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengetahui kebenaran itu.

c. Pengendalian Internal

Pengendalian internal (*internal control*) merupakan suatu usaha berupa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, sebagai *assurance* untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pengendalian internal berperan penting dalam menciptakan efisiensi dan produktivitas operasional, utamanya untuk mencapai suatu tujuan (Altamuro dan Beatty, 2010). *Internal control* memiliki pengaruh yang signifikan dalam penggunaan anggaran (Lasmaya *et. al.*, 2013). Pada sektor *public* konsepsi pengendalian internal bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Zamzani dan Faiz, 2015). Evolusi regulasi *internal control* juga menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian setiap management. September tahun 1992, *Internal control-integrated framework* merupakan sebuah isu perkembangan baru struktur pengendalian intern yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO), yang merupakan peningkatan dari konsep struktur pengendalian intern. *Integral control-frame work* ini lebih mempertinggi tingkat integrasi dari *internal control* organisasi dan peningkatkan dalam perlindungan terhadap asset-aset organisasi (Murtin, 2015). Kontribusi yang sangat besar akan didapatkan dari pengendalian internal terstruktur dengan memperhatikan komponen-komponen pengendalian internal tersebut. Komponen-komponen yang dapat menunjang pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), kegiatan pengawasan (*control activities*), pemahaman resiko (*risk assessment*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*) (Wahyuni dan Ngumar, 2013).

d. Pengelolaan Keuangan

Sumber pendanaan pemerintahan adalah berasal dari masyarakat dan tentu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pedoman pengelolaan keuangan dibuat agar dapat memberikan acuan kepada pengurus dalam mengelola dana organisasi tersebut. Setiap pengeluaran pemerintah tidak boleh didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu. Setiap pengeluaran pemerintah harus dipertimbangkan dampak lanjut dari pengeluaran tersebut. Dengan demikian setiap pengeluaran pemerintah harus diperhatikan fungsi dan tujuannya, serta mempertimbangkan kemampuan. Akuntansi keuangan yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan harusnya dapat menghasilkan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan (Warno dan Suedi, 2010). Akuntansi dalam pengelolaan keuangan membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pada pengelolaan keuangan diperlukan pencatatan untuk menjaga transaksi-transaksi tidak terjadi kekeliruan dimasa akan datang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam hal menggunakan transaksi non tunai e-money syariah dengan membuat analisis SWOT. Pengumpulan data dalam penelitian ini di dapat melalui proses pengamatan langsung ke lapangan (observasi) wawancara (interview) dengan pihak terkait, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan). Penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:9) metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dengan mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif bermaksud untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial dan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2017:6). Penelitian ini membahas mengenai makna dibalik setiap hal yang ada dalam pengelolaan keuangan yang dilihat dari pemahaman pengelola maupun perspektif prophetic.

Penelitian berlokasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, jln. Jenderal Sudirman Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang. *Peneliti berusaha memahami makna dari pengalaman pelaksana (pegawai) pengelola keuangan yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan perspektif partisipan dan perspektif prophetic* melalui Pendekatan Fenomenologis. Gambaran Nilai prophetic akan diobjektifikasi melalui Pendekatan teologis. Pengelolaan keuangan yang diulas dalam penelitian ini merupakan interpretasi dari sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dan menempati posisi pertama sebagai manusia yang paling berpengaruh di Dunia.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Abdullah	Kementerian Agama Kab. Takalar	Kepala Kantor
2.	Ramlah	Kementerian Agama Kab. Takalar	Kepala Sub. Bag. Tata Usaha
3.	Reskiani	Kementerian Agama Kab. Takalar	Bendahara/Pengeluaran
4.	Amriani	Kementerian Agama Kab. Takalar	Bendahara/Penerimaan

Analisis data kualitatif bertujuan untuk menganalisis proses berlangsungnya fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut serta menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu (Bungin, 2007:161). Data yang diperoleh dianalisis untuk mengungkapkan makna dalam pandangan objek-subjek yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan bahwa penelitian kualitatif terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan,

dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak lata-kata daripada angka-angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan (Yusuf, 2014: 407). Miles dan Huberman mengemukakan tiga kegiatan dalam analisis data sebagai berikut.

- a. Tahap Reduksi Data. Tahap reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan transformasi data “mentah” yang terlihat dalam catatan tulisan lapangan yang berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014:336). Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.
- b. Data Display. Data display yaitu kegiatan dimana data yang berupa kumpulan informasi telah tersusun dalam bentuk teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, mendapatkan gambaran yang jelas mengenai data keseluruhan dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. Kesimpulan/Verifikasi. Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis Miles dan Huberman. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. Oleh karena peneliti sebagai bagian dari instrumen penelitian, sehingga setiap data telah dicek keakuratan dan validitasnya

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Pengelolaan Keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar

Pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Keberhasilan pengelolaan keuangan sangat ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi para pengelola keuangan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar merupakan sebuah Instansi Vertikal Pemerintah Pusat, yang pengelolaannya merupakan Pengguna Anggaran (PA) dan tidak terdapat target atas pendapatan negara.

- 1) Perencanaan

Perencanaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar menurut informan penelitian, dalam hal ini Amriani, yaitu:

“Telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar telah dilakukan sesuai prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang merupakan subbagian dari Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran,

evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan. Sinkronisasi antara perencanaan pusat dan perencanaan kementerian sangatlah diperlukan untuk meminimalisir permasalahan yang biasa terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan kualitas perencanaan yang profesional dan inovatif. Pegawai bagian perencanaan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses perencanaan. Perencanaan dan penganggaran dapat menghasilkan *output* yang secara akumulatif dapat memberikan manfaat bagi kemajuan program yang ditetapkan, sehingga berpengaruh pada pencapaian Visi dan Misi Kementerian Agama yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan penjelasan Amriani tersebut di atas, Reskiani menjelaskan sebagai berikut:

“Bendahara Pengeluaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar menuturkan bahwa, bagian perencanaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan menyusun rencana kerja kementerian dengan terlebih dahulu mengacu pada rencana kerja pemerintah serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Kemudian, bagian perencanaan akan mengambil berbagai data yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja kementerian. Data-data yang diperlukan bersumber dari data bagian keuangan, bagian kepegawaian, dan bagian-bagian lainnya di Kementerian Agama. Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya ditinjau dan dikomunikasikan untuk mempertimbangkan mengenai kelebihan anggaran suatu program atau kegiatan, kekurangan anggaran suatu program atau kegiatan, serta program atau kegiatan apa saja yang memerlukan pengalihan anggaran atau pengadaan barang/jasa”.

2) Pelaksanaan

Koordinasi antar pegawai dalam setiap subbagian kantor harus terjalin dengan baik dalam proses tersebut karena hal ini menjadi dasar untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Berdasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar (2018), program-program kerja yang dibuat oleh bagian perencanaan disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Penetapan kinerja penanggungjawab setiap program diwujudkan melalui Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Kepala Seksi) dan penanggungjawab umum Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Daftar isian pelaksanaan anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri ataupun Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. DIPA berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sebagai dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

3) Penatausahaan

Pengelolaan yang baik terhadap keuangan juga diwujudkan melalui penatausahaan keuangan. Penatausahaan dilakukan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan, asset/kekayaan dan kewajiban dengan berbagai ketentuan, prosedur, dokumen dan lainnya. Sub Bagian Tata Usaha memiliki peran penting dalam melakukan penatausahaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Sub Bagian Tata Usaha bertugas melakukan pelayanan teknis administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga kepada seluruh satuan organisasi dan atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar.

Bendahara penerimaan/pengeluaran memiliki peran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Bendahara penerimaan memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan, melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Sedangkan Bendahara Pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Selain itu, kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan anggaran dilakukan oleh Verifikator keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Pengadministrasian pada Sub bagian tata usaha juga melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang pengadministrasian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi Barang Milik Negara, penatausahaan BMN berpedoman pada standar akuntansi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem penatausahaan dibutuhkan dalam rangka pengamanan administratif yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN dan harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan.

Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN. Semua barang yang diperoleh dari sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penatausahaan BMN tersebut, termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi Barang Milik Negara (BMN). Reskiani mengemukakan bahwa:

“Penatausahaan BMN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, dilakukan oleh petugas SIMAK. Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebagai upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. SIMAK BMN merupakan sistem yang wajib digunakan dalam melakukan penatausahaan BMN, pengimplementasiannya harus dilakukan secara optimal agar laporan keuangan terjamin kualitasnya. Reskiani mengakui bahwa, pencairan anggaran akan dilakukan jika dokumen-dokumennya telah diperiksa oleh bagian verifikasi. Transaksi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar juga sebagian masih secara tunai dan non tunai. Namun, kemungkinan periode berikutnya akan menerapkan transaksi non tunai secara keseluruhan. Transaksi non tunai tersebut sebagai usaha untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan”.

Dasar hukum transaksi non tunai juga diperkuat oleh Dasar diterapkannya sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan arahan Menteri dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 27 Oktober 2017 lalu. Surat edaran tersebut berisi permintaan agar segenap pengelola keuangan di Kementerian Agama melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan cara mengubah pola pembayaran tunai menjadi non-tunai. Selain itu, hal ini juga sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

4) Pelaporan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menjelaskan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai instansi pemerintahan vertikal, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar menggunakan aplikasi SAIBA dan juga menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Penerapan aplikasi SAIBA pada Kementerian Agama Kabupaten Takalar telah dilakukan dibuktikan dengan adanya operator SAIBA dalam lingkungan satuan kerja.

5) Pertanggungjawaban

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rata-rata capaian kinerja dari masing-masing program adalah 99,52%.

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Masing-masing Program

No.	Program	Capaian Per Program
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	99,69%
2	Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh	100%
3	Program Pendidikan Islam	99,92%
4	Program Bimbingan Masyarakat Islam	97,59%
Rata-rata Capaian Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Takalar		99,52%

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, 2018

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya, untuk mengukur visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu, berikut adalah analisis capaian kinerja secara rinci selanjutnya dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

6) Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketidaksihinggaan antara perencanaan dan implementasi program dan kegiatan dapat mengindikasikan adanya penyimpangan, hal tersebut berarti bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak akuntabel dan juga terindikasi tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai pengendalian internal, pemisahan tanggungjawab untuk operasi yang berkaitan telah dilakukan untuk menekan kemungkinan terjadinya ketidakefisienan, kesalahan dan kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar dalam mengelola keuangan negara, antara lain: (a) terbatasnya dana, sarana, dan prasarana serta alat transportasi; (b) sumber daya manusia masih belum bekerja dengan optimal; dan (c) komunikasi dan informasi antar umat beragama belum optimal.

Kendala-kendala tersebut juga diperkuat dengan penuturan Ramlah yang mengakui bahwa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar masih kekurangan karyawan, terkhusus di bagian keuangan. Pada dasarnya, kualifikasi pendidikan pegawai yang bertugas di bagian keuangan seharusnya minimal sarjana ekonomi. Hanya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang memenuhi kualifikasi tersebut. Pegawai lainnya yang bertugas di bagian keuangan bahkan dilingkungan kementerian agama masih belum relevan antara latar belakang pendidikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun, para pegawai telah berusaha memenuhi tugasnya dengan baik. Melalui pelatihan dan belajar mandiri

telah mereka lakukan untuk menjaga kualitas kinerja mereka. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (a) melakukan efisiensi dan efektifitas keuangan; (b) mengoptimalkan sumber-sumber daya yang dimiliki; (c) meningkatkan sumber daya manusia bagi pegawai dan guru; dan (d) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Implementasi Nilai Prophetic dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar

Setiap individu telah diresapi oleh nilai-nilai budaya dari lingkungan sekitarnya sejak kecil, sehingga konsep-konsep nilai tersebut telah berakar kuat di dalam mentalitasnya. Suatu nilai adalah wujud ideal dari lingkungan sosial, sehingga untuk mengubah suatu nilai membutuhkan waktu dan hal tersebut tidak mudah. Pengaruh dari lingkungan sekitar tentu sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Dalam tradisi Islam, berbuat baik didunia akan mendapatkan pahala terbaik yang membawanya kelak menuju surga-Nya, sedangkan orang yang berbuat buruk selama hidup di dunia akan mendapatkan siksaan di neraka. Hal ini menjadi doktrin dalam diri setiap muslim untuk senantiasa melakukan segala sesuatu dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadist. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Rasulullah saw. sebagai pembawa risalah islam yang mencakupi *huda* (petunjuk) dan *dienul haq* (agama yang benar). Teladan terbaik telah ada pada diri beliau.

Nilai *Prophetic* merupakan tradisi kenabian yang mengkristal menjadi sifat-sifat Rasulullah saw yaitu: *Shiddiq, Amaanah, Fathanah* dan *Tabligh*. Dewasa ini, nilai-nilai *prophetic* telah diintegrasikan dalam pembentukan karakter di setiap sendi masyarakat yang memang seyogyanya telah diwariskan Rasulullah sebagai tauladan terbaik. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar sebagai institusi pemerintah tentunya memiliki peran lebih dalam pembentukan karakter masyarakat pada umumnya terutama masyarakat muslim dan mengimplementasikan nilai-nilai *prophetic* sehingga menjadi kesadaran dan dasar hidup dan tertanam dalam diri pengelola keuangan di kementerian agama kabupaten takalar juga sangat dipengaruhi aspek ibadah ritual atau ritus-ritus agama seperti sholat, puasa dan membaca al-Qur'an. Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut yang dapat dikatakan sebagai tanda atau symbol dalam mengekspresikan paham keagamaan seorang pengelola keuangan. Abdullaah menjelaskan bahwa:

“Para pegawai telah memiliki kesadaran untuk beribadah dengan baik. Ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Upaya menghidupkan sifat dan nilai-nilai prophetic dimulai dari aspek ibadah yang berbanding lurus dengan muamalah, keseimbangan antara ibadah dan muamalah akan menjadi barometer dalam diri setiap pengelola keuangan dalam lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Takalar agar tidak melakukan pelanggaran dan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dasar dalam menjalankan amanah”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, peneliti berasumsi bahwa pemahaman dan pandangan para pengelola keuangan dalam lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Takalar terhadap nilai *prophetic* telah tiba pada sikap advokasi sebab sebagian besar telah menyadari dan mempengaruhi satu sama lain meskipun belum sepenuhnya sempurna. Nilai-nilai hidup yang Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wasallam* telah wariskan

semestinya diimplementasikan sebagai tiang dan penyokong dan tentunya akan menjadi pengendalian diri bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai hidup yang dimaksud tak lain adalah sifat-sifat Rasulullah Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wasallam* yaitu: *Shiddiq, Amaanah, Fathanah* dan *Tabligh*.

1) *Shiddiq*

Abdullah mengemukakan bahwa: “Nilai *shiddiq* telah diimplementasikan oleh karyawan dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Seperti *Shiddiq*, yang merupakan dasar dalam menjalankan zona integritas. Sebuah zona dimana kita harus *on the track*. *Shiddiq* adalah istilah teknis yang senafas dengan integritas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar telah berupaya dengan mengarahkan para pengelola keuangan secara khusus dan semua pegawai yang berada pada lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar untuk menjadi pegawai yang memiliki integritas. Jujur terhadap dirinya, keluarganya, terhadap lingkungannya, dan terhadap jam kerjanya. Setiap saat diingatkan terutama dalam apel setiap pekan. Sebab itu tumbuhlah kesadaran dari setiap pribadi agar berupaya meninggalkan kebohongan”.

2) *Amanah*

Abdullah, menyebutkan bahwa: “*Amanah* dalam terminnya adalah sebuah bentuk sikap percaya dan dipercaya. *Amanah* tak ubahnya merupakan tanggungjawab sebagai pengelola keuangan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Takalar untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, terkhusus pada Kementerian Agama. Sebab itu, sikap *amanah* yang Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wasallam*, contohkan sejalan dengan Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama. Semua karyawan harus bertanggungjawab, berintegritas, berinovasi, memiliki sikap keteladanan bagi masyarakat pada umumnya”

3) *Fathanah*

Abdullah mengemukakan bahwa: “*Fathanah* adalah salah satu sifat Rasulullah Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, yang patut dimiliki oleh setiap muslim terutama sebagai pengelola keuangan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Takalar. *Fathanah* secara bahasa berarti memiliki pengetahuan luas, cerdas, mengerti akan sesuatu dan dapat menjelaskannya. Kecerdasan yang dimaksudkannya ini bukan hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual. Sifat ini mendorong kearifan berfikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme”.

Menurut Abdullah, “Sifat *fathanah* ini harusnya dimiliki oleh unsur pimpinan di lembaga manapun, begitu juga di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Sebagai Kepala Kantor, wajib memiliki kecerdasan yang mampu memmanage dan mengatur setiap postulat yang ada di lingkungan kantor kementerian agama kabupaten takalar agar tidak lestari dalam mengelola dan memberikan gebrakan-gebrakan baru yang tentunya tidak melanggar aturan dan undang-undang dasar”. Beliau melanjutkan bahwa: “*Fathanah* sejatinya membentuk karakter yang solutif terhadap setiap permasalahan yang hadir di

lingkungan kantor kementerian agama kabupaten takalar seperti dalam masalah keuangan, anggaran dana yang tidak mencukupi serangkaian program kerja yang tidak mungkin ditinggalkan, saat seperti inilah sifat fathanah sangat dibutuhkan sehingga pimpinan atau kepala kantor berinisiasi mencari mitra kerja yang dapat membantu terlaksananya program kerja tanpa melanggar aturan dan undang-undang”.

Penuturan Abdullah tersebut di atas, juga diperkuat dengan pengakuan Ramlah bahwa: “Tidak jarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar bermitra dengan bank pemerintah daerah bahkan dengan bank swasta seperti Bank Mandiri Syariah dalam pendanaan program kerja tertentu. Maka dari itu, peneliti berasumsi bahwa sifat fathanah oleh para pengelola keuangan di lingkungan kantor kementerian agama kabupaten takalar telah diimplementasikan meskipun masih memiliki kekurangan dalam hal lain”.

4) Tabligh

Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif yang transparan, dalam hal ini adalah bentuk komunikasi dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, komunikasi antara kepala kantor dengan kepala bagian dan para pegawai cenderung baik, dibuktikan dengan rapat bulanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar dalam membahas permasalahan yang dihadapi. Begitu pula dengan hal-hal yang menyangkut anggaran dan dana. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar mengaku bahwa pengelolaan keuangan. Dengan demikian, penuturan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar tentang nilai-nilai *prophetic* yang meliputi *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh* telah diupayakan untuk diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja para karyawan. Nilai-nilai *prophetic* tersebut terinterpretasikan dalam Lima Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Lima budaya kerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Lima Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia

No.	Budaya Kerja	Indikasi Positif	Indikasi Negatif
1.	Integritas (Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar)	a. Bertekad dan bekemauan untuk berbuat yang baik dan benar b. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Menolak korupsi, suap, atau gratifikasi	a. Melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan b. Melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi c. Menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan

2.	Profesionalitas (Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan b. Disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja c. Melakukan pekerjaan secara terukur d. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu e. Menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pekerjaan tanpa perencanaan yang matang b. Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi c. Malas dalam bekerja d. Melakukan pekerjaan dengan hasil yang tidak sesuai dengan standar
3.	Inovasi (Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik)	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan b. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif c. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> a. Merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai b. Bersikap apatis dalam merespons kebutuhan stakeholder dan user c. Malas belajar, bertanya, dan berdiskusi d. Bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan
4.	Tanggungjawab (Bekerja secara tuntas dan konsekuen)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu b. Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi, dan melakukan langkah-langkah perbaikan c. Mengatasi masalah dengan segera 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lalai dalam melaksanakan tugas b. Menunda-nunda dan/atau menghindar dalam melaksanakan tugas c. Selalu merasa benar dan suka menyalahkan orang lain d. Menolak resiko atas hasil pekerjaan

		d. Komitmen dengan tugas yang diberikan	e. Memilih-milih pekerjaan sesuai dengan keinginan pribadi f. Menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab
5.	Keteladanan (Menjadi contoh yang baik bagi orang lain)	a. Berakhlak terpuji b. Memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan, dan adil c. Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat d. Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri	a. Berakhlak tercela b. Melayani dengan seadanya dan sikap setengah hati c. Memperlakukan orang berbeda-beda secara subjektif d. Melanggar peraturan perundang-undangan e. Melakukan pembiaran terhadap bentuk pelanggaran

Sumber: LAKIP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, 2018

Semua karyawan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar harus menerapkan Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini sebagai wujud peningkatan kinerja dan untuk mengembalikan citra baik dan kepercayaan masyarakat pada Kementerian Agama RI. Upaya peningkatan kinerja tersebut tentu harus didukung dengan keikhlasan para karyawan sebagaimana semboyan Kementerian Agama, “ikhlas beramal”.

c. Matriks Hasil Penelitian

Tabel 4.3 Matriks Hasil Penelitian

Nilai Prophetic	Implementasi pada Pengelolaan Keuangan	5 Budaya Kerja Kemenag RI
Shiddiq	On the track	Integritas
Amanah	Bekerja sesuai tupoksi dan menjaga kepercayaan	Tanggungjawab
Fathanah	Cerdas, kreatif, dan bijaksana	Inovasi
Tabligh	Transparansi & Komunikatif	Profesionalitas Keteladanan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan dengan Nilai *Prophetic* pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar telah dilaksanakan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. Namun, peningkatan SDM masih harus ditingkatkan, karena jika dilihat dari latarbelakang pendidikan dan tupoksi yang diberikan kepada karyawan, masih banyak yang belum sinkron.
2. Implementasi nilai prophetic pada pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar diinterpretasikan melalui Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggungjawab, dan Keteladanan. Jika melihat dari implementasi *prophetic* dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, peneliti melihat bahwa para karyawan telah mengimplementasikan dengan baik. Tadarrus dan sholat dhuha dilaksanakan para karyawan sebelum memulai beraktivitas sehari-hari. Dalam kondisi ini, peran lingkungan sangat mempengaruhi kinerja, sebab fenomena.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahiabor, G. dan C. C. Y. Mensah. 2013. Effectiveness of Internal Control on the Finances of Churches in Greater Accra, Ghana. *Research Journal of Finance and Accounting*. 4(13): 115-121.
- Adji, P. dan M. N. H. Ryandono. Bagaimana Pedagang Muslim Istiqomah dalam Kejujuran?. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 4(5): 396-409.
- Ahyaruddin, M., E. Marlina, Z. Azmi, A. A. Putri, D. H. Anriv, I. Bidin, Agustiawan, dan N. F. Lawita. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Mesjid di Kota Pekanbaru. *Pengabdian Untuk MunegeRI*, 1(1): 7-12.
- Ali, H. B. 2014. Tugas dan Fungsi Dakwah dalam Pemikiran Sayyid Quthub. *Jurnal Dakwah Tabligh*. 15(1): 125-135.
- Almunadi. 2016. Shiddiq Dalam Pandangan Quraish Shihab. *JIA*. 17(1): 127-138.
- Altamuro, J., dan A. Beatty. 2010. How Does Internal Control Regulation Affect Financial Reporting?. *Journal of Accounting and Economics*. 49(1): 58-74.
- Asdar, U. Ludigdo, dan Y. Widya. 2014. Phenomenological Study of Financial Accountability of Mosque. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 5(4): 10-17.
- Azis, M. A. A., H. A. Rahman, M. M. Alam, dan J. Said. 2015. Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*. 28: 163-169.
- Azmi, R. A. dan T. A. P. Hary. 2013. Evaluasi Jiwa Kepemimpinan Santri ditinjau dari Kepemimpinan Kenabian. *Jurnal SPIRITS*. 4(1): 21-32.
- Bongani, N. 2013. Application of Internal Controls in NGOs: Evidence from Zimbabwe. *American Journal of Finance and Accounting*. 1(2): 39- 47.
- Chowdhury, R. R., J. Innes, dan R. Khouhy. 2005. The Public Sector Audit Expectation Gap in Bangladesh. *Managerial Auditing Journal*. 20(8): 893-908.
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dalimunthe, R. P. 2016. Amanah dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmu Hadis*. 1(1): 7-16.
- Damarjati, D. 2018. "Kasus-kasus di Kemenag hingga Muncul Makian Bangsat". *News.Detik.Com*, 29 Maret 2018. <https://news.detik.com/berita/d-3943426/kasus-kasus-di-kemenag-hingga-muncul-makian-bangsat> (18 Agustus 2019).
- Efferin, S. 2015 . Akuntansi, Spiritualitas dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 6(3): 466-480.

- Elrado, S. H., M. Kumadji, dan E. Yulianto. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan, Kepercayaan dan Loyalitas (Survei Pada Pelanggan yang Menginap Di Jambuluwuk Batu Resort Kota Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 15(2): 1-9.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Endahwati, Y. D. 2014. Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (zis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 4(1): 1356-1379.
- Eton, M., C. Murezi, F. Mwosi, dan P. B. Ogwel. 2018. Internal control systems and financial accountability in Uganda: A case of selected districts in western Uganda. *International Journal of Commerce and Management Research*. 4(4): 106-111.
- Febrianty dan Divianto. 2017. Evaluasi Kinerja berdasarkan Implementasi Sistem Pengendalian Internal. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. 10(2): 193-210.
- Fitria, Y. 2017. Akuntabilitas pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. *AKUNTABEL*. 14(1): 38-45.
- Furqan. 2015. Peran Jama'ah Tabligh dalam Pengembangan Dakwah. *Jurnal Al-Bayan*. 21(32): 1-14.
- Ko, K., & Moon, S.-G. 2014. The relationship between religion and corruption: are the proposed causal links empirically valid?. *International Review of Public Administration*. 19(1) : 44–62.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Kusdewanti, Amelia Indah dan Husnul Hatimah. 2016. Membangun Akuntabilitas Profetik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2): 286-307.
- Lasmaya, S. M., B. T. Fitria, dan Mulyatno. 2013. Pengaruh Pengendalian Keuangan terhadap Penggunaan Anggaran pada Keuangan Pusat II Direktorat Keuangan Angkatan Darat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*. 7(2): 95-104.
- Lumempouw, G., V. Ilat, dan A. Wangkar. 2015. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Penjualan Kredit pada PT. Sinar Pure Foods International. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15(4): 312-323.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Reamaja Rosdakarya.
- Muhasim. 2017. Budaya Kejujuran dalam menghadapi Perubahan Zaman (Studi Fenomenologi Masyarakat Islam Modern). *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. 5(1) 2017.
- Murtin, A. 2015. Internal Control Peran dan Perkembangannya. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. 1(1): 1-10.
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*.
- Noviandani, M. I. dan D. F. Septiarini. 2015. Nilai - Nilai Amanah Sebagai Strategi Fungsional Pada Rumah Makan Wong Solo Cabang Gresik. *JESTT*. 2(5): 400-412.
- Prasetyo, E.P. 2017. Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1): 19-33.
- Rahayu, R. A. 2014. Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 4(2): 631-638.
- Roqib, M. 2013. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Profetik. *Jurnal Pendidikan Karakter*. 3(3).
- Sakdiyah. 2016. Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah. *Jurnal Al-Bayan*. 22(33): 29-49.
- Salle, I. Z. 2015. Akuntabilitas Manunggi: Memaknai Nilai Kalambusang pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 6(1): 28-37.
- Santoso dan Yanti. 2015. Pengaruh Perilaku Tidak Jujur dan Kompetensi Moral terhadap Kecurangan Akademik (Academic Fraud) Mahasiswa Akuntansi *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. 15(1): 1-16.

- Sawitri, P. 2011. Interaksi Budaya Organisasi dengan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Unit Bisnis Industri Manufaktur dan Jasa. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 13(2): 151-161.
- Sayuti, S., J. Majid, dan M. S. S. Juardi. 2018. Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(1): 16-28.
- Sumarni, S., Nasir, M., Syam, A. R., & Ampriy, E. S. (2021, December). Improving Education Quality Improvement Through Organizational Culture. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*.
- Sumarni, S., Syam, A. R., & Sir, P. (2020). Analysis of archives management in the administration section in elementary schools. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 5(1), 69-78.
- Suud, F. M. dan Subandi . 2017. Kejujuran dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep dan Empiris. *Jurnal Psikologi Islam*. 5(2): 121—134.
- Syam, A. R., & Arifin, S. (2019, June). Quality of Educational Services in Islam Perspective. In *WESTECH 2018: Proceedings of 1st Workshop on Environmental Science, Society, and Technology, WESTECH 2018, December 8th, 2018, Medan, Indonesia* (p. 439). European Alliance for Innovation.
- Syam, A. R., & Arifin, S. (2018). Islamic Educational Institution Policies Based on Creative Economic the Asean Era Economic Community. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 6(1), 049-063.
- Tusriyanto. 2014. Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab. *Akademika* 19(1): 117-134.
- Ubaedillah, A. dan A. Rozak. 2014. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Cet. XI; Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, S. dan S. Ngumar. 2013. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern terhadap Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang pada UD. Dwi Jaya Sentosa Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. 2(3): 1-23.
- Wijayanti, T. dan N. Setiawan. 2016. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Sistem Penerimaan Kas pada Organisasi Nirlaba. *Jurnal Profita*. Edisi 1 : 1-16.
- Wulansari, A., Sumaryanti, L., & Syam, A. R. (2022). Dampak Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Publication Library and Information Science*, 5(2), 34-47.
- Yurmaini. 2017. Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 3(1): 93-104.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zahroh, F. dan M. Nafik. 2015. Nilai Fathonah dalam Pengelolaan Bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo. *JESTT*. 2(9): 745-758.
- Zamzami, F. dan I. A. Faiz. 2015. Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 6(1): 20-27.
- Zoelisty, C. dan Adityawarman. 2014. Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3): 1-12.
- Zuhaira, M . A. M. dan Yezhuang, T. 2017. The Effect of Religious Beliefs, Participation and Values on Corruption: Survey Evidence from Iraq. (*IJACSA*) *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. 8(8): 302-305.
- Zulaiha, S. 2017. Pendekatan Metodologis dan Teologis bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI. *Ar-Riyah: Jurnal Pendidikan Dasar*. 1(1):45-64.